



Peran Pengelolaan Informasi Publik Pada Laman KPU Kabupaten Sidoarjo Sebagai Upaya Edukasi Politik Masyarakat

Farell Dhia Masayu¹, Sarah Meirina Sari²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: aretatara1@gmail.com, sarah.meirina.fisip@upnjatim.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged public institutions to manage and disseminate information in a more transparent, accountable, and accessible manner. In the context of election administration, public information management plays a crucial role in supporting transparency, accountability, and public political literacy. This study aims to analyze public information management on the official website of the Sidoarjo Regency Election Commission (KPU) based on the principles of good governance as proposed by Dwiyanto. This research employs a descriptive qualitative method using observation, in-depth interviews, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the principles of accountability, transparency, and non-partisanship have been implemented relatively well in managing the KPU Sidoarjo website. However, the principles of efficiency, responsiveness, and participation still face several challenges, particularly related to limited human resources, technical constraints, and the lack of interactive features. This study concludes that the KPU Sidoarjo website has significant potential as a medium for public information and political education, but continuous improvement is needed to ensure the optimal implementation of all good governance principles in digital public information management.

Keywords: Public Information Disclosure, Good Governance, Election Commission Website, Information Management, Political Participation.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lembaga publik untuk mengelola dan menyajikan informasi secara lebih terbuka, cepat, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pengelolaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta literasi politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan informasi publik pada laman resmi KPU Kabupaten Sidoarjo berdasarkan prinsip good governance menurut Dwiyanto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-partisan telah diterapkan dengan cukup baik dalam pengelolaan laman KPU Kabupaten Sidoarjo. Namun, prinsip efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, serta belum optimalnya fitur interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

laman KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis sebagai media informasi dan edukasi politik, namun memerlukan penguatan berkelanjutan agar seluruh prinsip good governance dapat diterapkan secara optimal dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital.

Keywords: *Pelayanan Publik Inklusif, Penyandang Disabilitas, New Public Service, KPU Sidoarjo, Administrasi Publik.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong perubahan besar dalam pola hubungan antara lembaga publik dan masyarakat. Informasi kini dipahami sebagai elemen strategis yang menentukan kualitas transparansi dan efektivitas pemerintahan, bukan lagi sekadar pelengkap administrasi. Transformasi digital inilah yang menciptakan ruang baru bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat dan luas sehingga memperkuat peran mereka dalam sistem demokrasi (McQuail, 2010).

Dalam ranah administrasi publik, pengelolaan informasi dipandang sebagai proses komprehensif yang meliputi penyusunan, pengumpulan, pengorganisasian, pemeliharaan, hingga penyebaran informasi secara sistematis. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab (Komisi Informasi Pusat, 2010). Dengan demikian, pengelolaan informasi menjadi kunci untuk menghadirkan pemerintahan yang transparan.

Perubahan teknologi telah menggeser cara pemerintah menyajikan informasi kepada publik. Jika sebelumnya pemerintah bergantung pada media konvensional, kini platform digital – khususnya Laman menjadi saluran utama yang menawarkan kecepatan, kemudahan akses, dan keterjangkauan lebih luas (Bungin, 2017). Kondisi ini menuntut lembaga publik untuk meningkatkan kualitas konten serta memperhatikan format penyajian agar informasi lebih relevan dan mudah dipahami.

Kemajuan tersebut berkaitan erat dengan tuntutan penguatan prinsip good governance. UNDP (1997) mengemukakan bahwa good governance mencakup berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat dependens pada kualitas pengelolaan informasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Tanpa penyediaan informasi publik yang optimal, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diwujudkan secara penuh.

Di Indonesia, wacana peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan semakin menonjol seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk memperoleh layanan publik yang lebih baik. Pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi secara terbuka sebagai wujud akuntabilitas dan sarana pengawasan publik (Dwiyanto, 2015). Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi bagian integral dari proses reformasi birokrasi.

Peran Laman sebagai media penyebaran informasi publik semakin dominan. Laman memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyajikan konten secara

terstruktur, fleksibel, dan dapat diakses 24 jam. Selain sebagai pusat informasi, Laman juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik yang mampu memperkuat literasi warga negara (Sedarmayanti, 2012). Dengan demikian, Laman memainkan peran ganda: media komunikasi dan media pembelajaran. Laman Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Laman memegang peran yang sangat signifikan. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk memberikan informasi yang transparan dan komprehensif mengenai seluruh tahapan pemilu agar masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memahami proses demokrasi dengan lebih baik (Transparency International, 2003). Ketersediaan informasi pemilu secara digital diharapkan dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari struktur penyelenggaraan pemilu nasional memanfaatkan Laman resminya sebagai media publikasi utama. Berbagai informasi seperti jadwal tahapan pemilu, berita kegiatan, dokumen regulasi, layanan data pemilih, dan informasi edukatif disajikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (Yuningsih, 2016). Melalui Laman ini, masyarakat bisa mengakses informasi pemilu tanpa hambatan ruang dan waktu.

Meski demikian, keberhasilan Laman sebagai sarana edukasi politik tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan konten, tetapi juga kualitas pengelolaannya. Konsistensi pembaruan informasi, kejelasan penyampaian, tampilan antarmuka, serta keterhubungan antar-halman menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas Laman bagi pengguna (Creswell, 2014). Kelemahan pada aspek-aspek tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat memahami informasi yang tersedia.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menilai apakah laman KPU Kabupaten Sidoarjo telah mengelola informasi publik secara efektif sesuai prinsip keterbukaan informasi dan good governance. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana Laman tersebut berkontribusi terhadap peningkatan literasi politik masyarakat di era digital (McQuail, 2010). Analisis tersebut juga menjadi bahan dasar untuk peningkatan kualitas pengelolaan informasi di masa mendatang.

Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena masyarakat Sidoarjo memiliki tingkat partisipasi politik yang dinamis dan memerlukan akses informasi yang memadai. Dengan menyediakan informasi yang tepat dan mudah dipahami, Laman KPU dapat membantu pemilih memahami proses pemilu, meningkatkan kesadaran politik, dan memperkuat kualitas partisipasi politik mereka (Yuningsih, 2016). Dengan demikian, kualitas Laman menjadi faktor strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Dalam perkembangan masyarakat digital saat ini, kebutuhan akan akses informasi politik yang cepat dan kredibel semakin meningkat. Banyak masyarakat yang mengandalkan internet sebagai sumber utama informasi sebelum mengambil sikap politik tertentu. Oleh karena itu, laman KPU Kabupaten Sidoarjo dituntut tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan responsif terhadap kebutuhan publik (Bungin, 2017).

KPU Sidoarjo juga memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan konten yang dipublikasikan sesuai standar keterbukaan informasi publik. Hal ini

mencakup kejelasan struktur penyampaian, keteraturan pembaruan data, serta penyediaan dokumen resmi yang lengkap dan mudah diakses (Komisi Informasi Pusat, 2010). Ketidakefektifan pada aspek-aspek ini dapat memengaruhi persepsi publik mengenai transparansi lembaga.

Di sisi lain, Laman KPU berpotensi menjadi sarana modern untuk meningkatkan kapasitas politik masyarakat. Konten-konten edukatif seperti infografis, video penjelasan, atau artikel literasi politik dapat membantu masyarakat memahami konsep demokrasi secara lebih mendalam. Pemanfaatan media digital ini juga sejalan dengan kecenderungan masyarakat yang semakin terbiasa mengakses informasi melalui perangkat berbasis internet (Sedarmayanti, 2012).

Pada akhirnya, penelitian ini relevan karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan informasi publik di tingkat lokal. Temuan penelitian diharapkan mampu mendorong perbaikan tidak hanya pada aspek penyajian informasi, tetapi juga pada pola komunikasi publik KPU Sidoarjo secara keseluruhan. Dengan demikian, Laman tidak hanya menjadi media publikasi, tetapi juga instrumen pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat Sidoarjo (Dwiyanto, 2015).

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk menggali dan menjelaskan secara komprehensif bagaimana pengelolaan informasi publik pada laman KPU Kabupaten Sidoarjo dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut pemikiran Dwiyanto dalam karya-karyanya dari tahun 2019 hingga 2024. Pendekatan kualitatif digunakan karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alami, serta menafsirkan proses penyediaan informasi publik digital secara lebih utuh. Dalam pandangan Dwiyanto (2020; 2022), *good governance* dalam sektor publik hanya dapat terwujud apabila lembaga publik menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta integritas birokrasi, yang tidak sekadar menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi standar moral pelayanan publik modern. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi rujukan utama dalam menganalisis bagaimana KPU Sidoarjo mengelola dan menyajikan informasi kepada masyarakat melalui Laman resminya.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui penelaahan langsung terhadap tampilan, navigasi, pembaruan konten, serta kelengkapan informasi pada laman KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menilai sejauh mana aspek transparansi dan efektivitas telah diterapkan sebagaimana dijelaskan (Dwiyanto, 2021). Wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola laman dan pejabat yang berwenang dalam penyebaran informasi untuk memperoleh pemahaman mengenai alur kerja internal, mekanisme validasi informasi, serta hambatan yang dihadapi dalam upaya memenuhi standar akuntabilitas dan responsivitas di era digital. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi

kesenjangan antara praktik dan standar ideal yang dikemukakan oleh Dwiyanto. Selain itu, analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data sekunder, seperti arsip publikasi KPU, laporan kegiatan resmi, dokumentasi proses tahapan pemilu, serta rekaman perubahan konten yang tersedia di laman tersebut. Dokumentasi ini digunakan untuk menilai konsistensi dan kesinambungan penerapan asas good governance dalam praktik penyebaran informasi publik. Pemikiran Dwiyanto (2023; 2024) menegaskan bahwa integritas dan keberlanjutan tata kelola informasi merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi digital, sehingga analisis terhadap dokumen resmi ini menjadi elemen krusial dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan interpretasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip good governance versi Dwiyanto diterapkan dalam pengelolaan informasi publik berbasis Laman , serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat kualitas layanan digital KPU Kabupaten Sidoarjo..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menguraikan secara mendalam hasil wawancara dengan pengelola laman resmi KPU Kabupaten Sidoarjo dan mengaitkannya dengan prinsip good governance menurut Dwiyanto. Enam prinsip utama yang menjadi fokus analisis meliputi akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, transparansi, partisipasi, dan non-partisan. Seluruh temuan yang dianalisis merupakan data terbaru yang diperoleh langsung dari narasumber, sehingga menggambarkan kondisi faktual pengelolaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, teori Dwiyanto digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menilai sejauh mana praktik yang dijalankan telah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas

Bedasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah membangun sistem pertanggungjawaban yang cukup jelas dalam pengelolaan informasi publik melalui website. Narasumber menjelaskan bahwa setiap informasi yang akan dipublikasikan harus melalui proses penyusunan oleh unit atau subbag terkait, kemudian diverifikasi oleh pejabat yang berwenang sebelum diserahkan kepada tim pengelola website. Proses ini menunjukkan bahwa tidak semua pihak dapat secara bebas mengunggah informasi, melainkan ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, ketika ditemukan informasi yang tidak akurat atau perlu diperbarui, KPU melakukan verifikasi lanjutan dan revisi resmi, serta menyimpan arsip perubahan sebagai bentuk dokumentasi. Praktik ini mencerminkan akuntabilitas eksplisit, yaitu pertanggungjawaban formal aparatur terhadap informasi yang dipublikasikan, sekaligus akuntabilitas implisit berupa kesadaran moral untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam perspektif Dwiyanto, akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam pelayanan publik karena

menunjukkan sejauh mana aparaturnya bertanggung jawab atas kebijakan dan layanan yang diberikan. Namun demikian, hasil wawancara juga mengindikasikan bahwa mekanisme akuntabilitas yang cukup ketat ini berdampak pada lamanya proses pembaruan informasi, sehingga menuntut adanya keseimbangan antara kehati-hatian dan kecepatan pelayanan informasi publik.

Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara memperlihatkan adanya sejumlah kendala yang memengaruhi kinerja pengelolaan website. Narasumber menyebutkan bahwa gangguan teknis seperti permasalahan server dan keterbatasan akses internet masih sering terjadi dan berdampak langsung pada proses pengunggahan konten. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama karena tim pengelola website memiliki jumlah yang terbatas dan harus menjalankan tugas rangkap. Kondisi ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui informasi menjadi lebih lama. Proses verifikasi yang berjenjang juga menambah durasi waktu sebelum suatu informasi dapat dipublikasikan. Dalam pandangan Dwiyanto, efisiensi pelayanan publik diukur dari perbandingan terbaik antara input dan output, yaitu sejauh mana organisasi mampu menghasilkan pelayanan yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa prinsip efisiensi belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan input berupa SDM dan dukungan teknis belum mampu menghasilkan output berupa pembaruan informasi yang cepat dan konsisten. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen sumber daya dan dukungan infrastruktur agar pengelolaan website dapat berjalan lebih efisien.

Responsivitas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap kebutuhan informasi masyarakat. Narasumber menjelaskan bahwa KPU secara aktif menyediakan berbagai konten edukatif seperti infografis, video sosialisasi, artikel pemilu, serta penjelasan mengenai regulasi ke pemilu. Selain itu, KPU juga berupaya memperbanyak materi literasi ke pemilu yang mencakup hak pilih, tata cara pencoblosan, hingga informasi mengenai peserta pemilu. Penyajian data pemilu secara terbuka juga menunjukkan upaya KPU untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan dan mudah diakses. Integrasi website dengan media sosial serta rencana pengembangan fitur chatbot dan FAQ interaktif merupakan langkah lanjutan untuk meningkatkan kecepatan respons terhadap pertanyaan masyarakat. Dalam teori Dwiyanto, responsivitas mencerminkan kemampuan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas pelayanan, dan merespons aspirasi publik secara tepat. Berdasarkan temuan wawancara, KPU telah menunjukkan responsivitas dalam hal perencanaan dan penyediaan kanal informasi, namun dalam praktiknya daya tanggap masih belum optimal karena keterbatasan SDM dan kendala teknis yang memengaruhi kecepatan pembaruan informasi di website.

Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara, menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek yang cukup menonjol dalam pengelolaan website KPU Kabupaten Sidoarjo. Narasumber menjelaskan bahwa KPU menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan menyusun konten secara sistematis dan menggunakan bahasa yang relatif sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, berbagai dokumen resmi disediakan dalam format unduhan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tanpa harus datang langsung ke kantor KPU. Keterbukaan data pemilih, informasi tahapan pemilu, dan publikasi regulasi menunjukkan komitmen KPU dalam memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik. Dalam perspektif Dwiyanto, transparansi bukan hanya soal membuka informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses dan dipahami. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi masih perlu diperkuat melalui konsistensi pembaruan konten agar informasi yang tersedia selalu mutakhir dan relevan dengan kondisi terkini.

Partisipasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan beberapa kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, seperti kolom kontak website, media sosial, dan survei kepuasan. Masukan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektivitas website sebagai media informasi publik. Namun, partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan lebih banyak bersifat satu arah, di mana masyarakat hanya berperan sebagai pemberi masukan setelah informasi dipublikasikan. Website belum menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan atau evaluasi informasi secara langsung. Dalam teori Dwiyanto, partisipasi ideal menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pelayanan publik. Berdasarkan hasil wawancara, prinsip partisipasi belum sepenuhnya terwujud dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar masyarakat dapat dilibatkan secara lebih aktif dan berkelanjutan.

Non-partisan

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa non-partisan terlihat diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan website KPU Kabupaten Sidoarjo. Narasumber menegaskan bahwa seluruh informasi yang dipublikasikan bersifat netral, informatif, dan tidak memihak kepentingan politik tertentu. Konten website difokuskan pada informasi teknis penyelenggaraan pemilu, regulasi, serta edukasi politik masyarakat tanpa memasukkan unsur politik praktis. Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto yang menekankan bahwa pelayanan publik harus diberikan secara adil dan tidak diskriminatif. Penerapan prinsip non-partisan ini menjadi faktor penting dalam menjaga integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dan memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik pada laman KPU Kabupaten Sidoarjo telah mengarah pada penerapan prinsip good governance menurut Dwiyanto. Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan non-partisan telah dijalankan dengan cukup baik dan menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan website. Namun, prinsip efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, serta belum optimalnya fitur interaktif. Temuan ini menegaskan bahwa website KPU memiliki potensi besar sebagai sarana informasi dan edukasi politik masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan yang berkelanjutan agar seluruh prinsip good governance dapat diterapkan secara lebih seimbang dan optimal dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik pada laman resmi KPU Kabupaten Sidoarjo secara umum telah mengarah pada penerapan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dikemukakan oleh Dwiyanto. Laman KPU berfungsi sebagai media utama penyebaran informasi kepemiluan yang mendukung keterbukaan informasi publik, transparansi, serta netralitas lembaga dalam penyelenggaraan pemilu. Prinsip akuntabilitas telah diterapkan melalui mekanisme verifikasi berjenjang, pembagian tanggung jawab yang jelas antarunit kerja, serta dokumentasi perubahan informasi yang dipublikasikan. Transparansi juga menjadi kekuatan utama, ditunjukkan oleh keterbukaan akses terhadap informasi tahapan pemilu, data pemilih, serta dokumen regulasi yang dapat diunduh oleh masyarakat. Selain itu, prinsip non-partisan dijalankan secara konsisten dengan menyajikan informasi yang bersifat netral, informatif, dan bebas dari kepentingan politik praktis, sehingga memperkuat integritas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, serta proses verifikasi yang berlapis berdampak pada lambatnya pembaruan informasi. Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat telah direncanakan dengan baik melalui penyediaan konten edukatif dan integrasi media sosial, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam praktik. Sementara itu, partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat satu arah dan belum difasilitasi secara maksimal melalui fitur interaktif pada laman. Keseluruhan, laman KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi strategis sebagai sarana informasi dan edukasi politik masyarakat di era digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek efisiensi pengelolaan, peningkatan daya tanggap terhadap kebutuhan publik, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar penerapan prinsip good governance dapat berjalan secara lebih seimbang dan optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Bungin, B. (2017). *Komunikasi Digital: Teori dan Penelitian Media Baru*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Transparansi, Akuntabilitas, dan Integritas Birokrasi*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2022). *Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Integritas dan Akuntabilitas*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2023). *Governansi Digital dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2024). *Birokrasi Digital dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.
- International, T. (2003). *Global Corruption Report 2003*. Transparency International.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. SAGE Publications.
- Pusat, K. I. (2010). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Panduan Resmi*. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Reformasi Birokrasi Publik*. Mandar Maju.
- United Nations Development Programme, U. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.
- Yuningsih, T. (2016). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Lokal: Tantangan dan Implementasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 11(2), 55–70. <https://doi.org/10.21831/jipi.v11i2.0000>